

## BPK Periksa Laporan Keuangan

### Kubu Raya, BERKAT.

BPK RI wilayah Kalbar telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemda Kubu Raya tahun anggaran 2011. Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Wilayah Kalbar, Diva Mahendra mengatakan pemeriksaan keuangan tersebut merupakan amanah undang-undang. BPK melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum diperdakan oleh pemerintah daerah sebagai laporan keuangan daerah.

"Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik dan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. Ini juga akan menjadi tolak ukur sejauh mana pengguna anggaran memahami konteks penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan tepat dan benar," ucapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Muhrotien mengingatkan bahwa

laporan keuangan perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. "Jika masih ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan BPK terkait dalam penyusunan laporan keuangan dari masing-masing bendahara SKPD, masih ada kesempatan untuk dikonsultasikan dengan BPK," katanya disela memberikan arahan kepada SKPD dalam pembukaan Pemeriksaan LKPD KKR TA 2011 belum lama ini.

Ditegaskan Wabup Andreas SKPD harus tahu dan paham apa yang sudah dikerjakan dengan anggaran yang ada dan apa hasilnya, sehingga saat diminta pertanggung jawaban tidak gamang.

"Laporan keuangan perlu dibuat dan disampaikan dengan sebaik-baiknya. Laporan keuangan harus benar dan teruji, artinya bisa dipertanggung jawabkan untuk itu perlu adanya konsolidasi," ujar

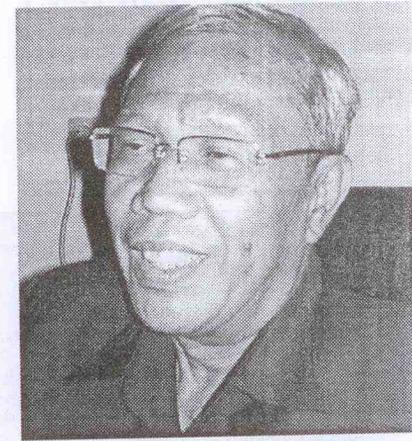
” SKPD harus tahu dan paham apa yang sudah dikerjakan dengan anggaran yang ada dan apa hasilnya, sehingga saat diminta pertanggung jawaban tidak gamang ”

### ANDREAS MUHROTIEN

Wakil Bupati Kubu Raya

Wabup Andreas.

Wabup Andreas mengingatkan jika SKPD menghadapi kendala maka segera dikonsultasikan dengan pimpinan untuk dicarikan jalan keluarnya. Mengingat sering ada masalah dalam pelaporan penggunaan anggaran maka laporan



keuangan harus disiapkan sebaik-baiknya.

Tempat yang sama Kepala Inspektorat Kubu Raya Ardanihans mengharapkan agar di tahun 2011, Kubu Raya minimal bisa mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. "Dan mudah-mudahan bisa mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," harapnya. (rob)